

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis saat ini menuntut para pelaku usaha untuk bersaing secara tepat dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas sumber daya perusahaan, hal ini juga didukung dengan pergeseran paradigma dari *comparative advantage* menjadi *competitive advantage* (Karsam, 2017). Tuntutan persaingan tersebut membuat perusahaan semakin gencar dalam melakukan ekspansi usahanya. Orientasi perusahaan yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan kepuasan investor, memotivasi perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara besar-besaran demi mendapatkan sumber daya yang diinginkan. Menurut Sejati dan Prastiwi (2015) untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, maka perusahaan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ini menimbulkan dampak yang cukup serius dalam beberapa waktu terakhir. Kerusakan lingkungan dan adanya isu-isu kemasyarakatan merupakan beberapa contoh yang timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan.

Kegiatan ekonomi yang berdampak baik secara langsung maupun tidak terhadap kehidupan sosial dan lingkungan dan ditambah tuntutan dari para *stakeholder*, membuat perusahaan mulai memperhatikan pembangunan jangka panjangnya. Sesuai dengan pernyataan dari Elkington (1998) Konsep pembangunan jangka panjang ini menggeser pijakan perusahaan dari konsep *single bottom line*, menjadi konsep *triple bottom line*. Konsep ini mengubah orientasi perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan, namun juga ikut serta berpartisipasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Seiring dengan bergesernya konsep bisnis ini, maka standar penilaian *stakeholder* akan kinerja perusahaan juga berubah. Tanggung jawab akan lingkungan dan masyarakat sekitar menjadi sebuah pertimbangan penting bagi investor untuk menilai sebuah perusahaan.

Di Indonesia sendiri, salah satu tindakan perusahaan yang cukup berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar adalah kasus bencana banjir lumpur panas yang disebabkan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. Kasus yang terjadi pada tahun 2006 silam tersebut masih menjadi perhatian bagi masyarakat hingga saat ini. Semburan lumpur panas terjadi akibat kesalahan perencanaan pengeboran yang akhirnya menyebabkan tenggelamnya area pertanian, pemukiman dan industri di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Meskipun kasus ini sudah berjalan hampir 13 tahun lamanya, permasalahan ganti rugi dan hutang masih berpengaruh bagi Group Bakrie. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, PT. Lapindo Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya bisnis milik keluarga Bakrie ini belum melunasi hutangnya kepada pemerintah. Hutang tersebut berupa dana talangan oleh pemerintah yang jatuh tempo pada 10 Juli 2019. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 773,38 miliar dengan bunga sebesar 4,8% pada 10 Juli 2015, hingga saat ini pemerintah mencatat bahwa sebesar Rp 1,91 triliun yang terdiri dari, pokok hutang sebesar Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar tersebut belum diselesaikan (Kumparan, 2020).

Tahun 2019 merupakan tahun dengan kinerja positif bagi sebagian besar perusahaan yang berada dalam afiliasi Group Bakrie. Dilaporkan pada tahun tersebut perusahaan PT. Bakrie and Brother's Tbk (BNBR) sendiri dilaporkan mencatat laba bersih.

Tabel 1. Data Laba (Rugi) PT. Bakrie and Brother's Tbk

PT. Bakrie and Brother's Tbk (BNBR)(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Laba (Rugi)
2015	Rp (1,719,369)
2016	Rp (3,661,618)
2017	Rp (1,198,994)
2018	Rp (1,250,213)
2019	Rp 863,270

Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan, diakses dari *idx.co.id*

Dalam wawancara dengan pihak *tirto.id*, Anindya Novyan Bakrie direktur utama Bakrie and Brothers menyatakan bahwa akhirnya BNBR berhasil mencetak laba yang merupakan kabar menggembirakan bagi *stakeholder* dan juga investor (Gumiwang, 2019). Namun kinerja positif yang ditorehkan perusahaan BNBR, ternyata tidak mampu mampu menggerakkan harga saham. Nilai saham Bakrie and

Brothers selalu mengalami penurunan dari Rp 500 ke Rp 50. Dilansir dari *money.kompas.com* diketahui beberapa saham dalam grup ini yaitu Bakrie and Brothers sendiri (BNBR), Energi Mega Persada (ENRG), Bakrie Telecom (BTEL), Bakrieland Development (ELYT), Bumi Resource Minerals (BMRS), Darma Henwa (DEWA), dan Bumi Resources (BUMI) berada di nilai yang sama yaitu Rp 50 per lembarnya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting yang mendukung penelitian. Diantaranya adalah, perusahaan tidak bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan yang rusak akibat kegiatan perusahaan di masa lampau. Hingga saat ini diketahui bahwa ganti rugi utang kepada pemerintah yang jatuh tempo pada tahun lalu juga belum diselesaikan. Serta hasil wawancara yang dikutip dari *tirto.id*, yaitu Direktur Utama perusahaan menyatakan bahwa akhirnya perusahaan dapat membukukan laba di tahun 2019, informasi ini didukung oleh data kinerja keuangan yang diambil dari laporan tahunan perusahaan selama lima tahun terakhir dan terdapat kenyataan bahwa perusahaan memang berhasil membukukan laba. Namun kondisi tersebut ternyata tidak mempengaruhi harga saham perusahaan. Oleh sebab itu diketahui bahwa pertanggung jawaban sosial dan lingkungan, kinerja perusahaan serta adanya indikasi terjadinya ketimpangan informasi antara *stakeholder* dengan pihak manajemen secara langsung maupun tidak, berdampak pada nilai perusahaan, dalam hal ini digambarkan oleh harga saham perusahaan.

Peningkatan nilai perusahaan menjadi tolak ukur kesejahteraan para pemiliknya, oleh sebab itu pertumbuhan nilai perusahaan menjadi suatu hal yang penting. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap kualitas perusahaan yang digambarkan dengan harga saham (Azari & Fachrizal, 2017; Yulianto & Widayasi, 2020). Harga saham yang meningkat, juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Penilaian kinerja dari sebuah perusahaan dapat dilihat dari pergerakan harga sahamnya. Salah satu rasio pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah Rasio *Tobin's Q*. Pengukuran menggunakan proksi tersebut pernah digunakan Klapper dan Love (2004) untuk mengukur nilai perusahaan. Dengan meningkatnya harga saham sebuah perusahaan, maka kepercayaan para stakeholder juga akan meningkat atas kinerja dan prospek entitas

dalam mengelola sumber dayanya. Kinerja perusahaan yang maksimal dilihat dari pengungkapan aspek keuangan didukung dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik maka akan menjadi tanda positif bagi para stakeholder khususnya investor untuk mempercayakan modalnya pada perusahaan.

Praktik pelaporan tanggung jawab perusahaan ini tidak bisa terlepas dari *stakeholder theory*. Pada dasarnya teori ini fokus untuk menjelaskan interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut Deegan (2019), apabila operasi yang dijalankan oleh organisasi tidak sesuai dengan kontrak sosial, maka perbaikan merupakan tindakan yang diharapkan. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan dan menciptakan kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang diimplementasikan oleh organisasi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sebagaimana tercermin dalam kontrak sosial dibutuhkan sebuah pengungkapan sebagai strategi legitimasi. Dalam rangka membangun legitimasi positif di masyarakat, perusahaan melakukan hal-hal yang mengarah pada peningkatan citra positif. Cara yang dapat digunakan untuk membangun citra positif dan meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan pengungkapan laporan pertanggung jawaban yang bersifat *sustainability* atau berkelanjutan.

Peraturan terkait pertanggung jawaban terhadap sosial dan lingkungan atau laporan berkelanjutan di Indonesia, diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang PT yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya (I. A. P. Sari & Andreas, 2019). Peraturan tersebut didukung oleh UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan hidup pasal 22 yang menyatakan bahwa, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan harus memiliki AMDAL. Pada tahun 2017 OJK mengeluarkan sebuah aturan No 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan. Salah satu pertimbangan OJK mengeluarkan peraturan tersebut, karena untuk dapat mencapai *sustainability development* yang dapat menjaga stabilitas dan inklusivitas ekonomi maka perlu dibangun sistem ekonomi nasional yang mengutamakan keharmonisan antara tiga aspek penting yaitu keuangan, masyarakat dan lingkungan. Jika terjadi ketimpangan diantara

ketiga aspek tersebut, maka akan berakibat ketidakberlanjutan dan instabilitas yang berujung pada tuntutan dari masyarakat untuk perusahaan (*Indonesiana.id*).

Laporan keberlanjutan merupakan sebuah laporan *stand alone* atau terpisah dari laporan tahunan. Dalam penyusunannya diperlukan sebuah standar yang dikembangkan oleh organisasi nirlaba yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI) yang memperkenalkan konsep Laporan keberlanjutan ini. Adapun pedoman yang berlaku hingga saat ini adalah GRI *standard* yang berjumlah 246 item pengungkapan aspek keuangan, lingkungan dan sosial. Dengan melaporkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, perusahaan ingin memperoleh legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan untuk menarik investor, klien dan pemangku kepentingan lainnya (Weber *et al.*, 2008). Dengan adanya penerimaan legitimasi dari para pemangku kepentingan, perusahaan mengharapkan adanya peningkatan citra di mata investor sehingga investor bersedia mempercayakan investasinya pada perusahaan dan berujung pada peningkatan nilai perusahaan (Kurniawan *et al.*, 2018). Kuzey dan Uyar (2017) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh signifikan nilai perusahaan. Fatchan dan Trisnawati (2016) turut menyatakan hasil yang serupa yaitu pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Priantinah (2018) yaitu pengungkapan laporan keberlanjutan tidak signifikan pada nilai perusahaan, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan pelaporan keberlanjutannya berdasarkan standar GRI dan masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan laporan keberlanjutan.

Kontrak antara pihak *agent* dan *principals* dalam praktiknya, agen (manajemen) diberikan wewenang oleh *principal* (pemegang saham) untuk bertindak dan melakukan *decision making* atas nama *principal*. Kewenangan yang diberikan *principal* memberikan keluasaan bagi pihak manajemen dan menimbulkan perilaku oportunistik yaitu memaksimalkan kesejahteraannya untuk memperoleh kompensasi (Cahyaningtyas *et al.*, 2019). Timbulnya perilaku oportunistik tersebut, memunculkan adanya perbedaan tingkat informasi yang dimiliki pihak manajemen dan para *stakeholder*, kondisi ini biasa disebut dengan *information asymmetries*. *Information asymmetries* timbul karena pihak yang memiliki informasi tidak

memberikan informasi tersebut secara jelas dan merata kepada seluruh pemangku kepentingan. Awal mulanya konsep asimetri dikemukakan oleh Akerlof (1970), Akerlof mengemukakan dalam sebuah pasar, penjual adalah pihak yang mengantongi informasi lebih baik mengenai kualitas produk dibandingkan dengan pembeli. Hal ini membuat pembeli salah dalam menentukan keputusan sehingga memilih produk yang berkualitas rendah dan menyebabkan kerugian.

Memperoleh informasi yang tepat dan akurat dianggap oleh investor sebagai syarat yang paling penting untuk melakukan keputusan investasi (Luu et al., 2020). Oleh sebab itu dibutuhkan satu cara untuk dapat mendeteksi adanya asimetri informasi dalam sebuah perusahaan. Transparansi merupakan mekanisme yang dapat digunakan manajer untuk mengurangi asimetri informasi dengan para pemegang saham (Cahyaningtyas et al., 2019). Apabila perusahaan tidak mampu memberikan sinyal atau dalam hal ini informasi yang relevan bagi para pemegang saham, maka akan berdampak pada nilai perusahaan yang menurun (Azari dan Fachrizal, 2017). Didukung oleh Luu et al. (2020) mengatakan bahwa *information asymmetries* sejenis dengan kegagalan pasar. Ketika asimetri timbul, maka hal tersebut akan mempengaruhi nilai pasar dan nilai perusahaan. Karena informasi yang bersifat asimetri dapat membuat investor individu atau institusi membuat keputusan keuangan yang salah sehingga membuat hilangnya investasi mereka dan nilai saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fosu et al. (2016); Luu et al. (2020) menyatakan bahwa adanya informasi yang bersifat asimetri akan menurunkan nilai perusahaan atau hasil menunjukkan signifikan negatif. Sedangkan riset yang dilakukan oleh Noviadewi dan Mulyani (2020) berkesimpulan bahwa adanya asimetri tidak membuat nilai perusahaan turun.

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam membuat dan mengimplementasikan rencana bisnisnya untuk mencapai keputusan investasi yang mendatangkan keuntungan (Rajaguguk *et al.*, 2018). Namun demikian, masih terdapat beberapa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kerugian laba bersih akibat kinerja keuangannya yang kurang baik. Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan oleh Surbakti dan Samosir (2019) dalam perhitungan statistik deskriptifnya menyatakan bahwa masih terdapat sekitar 25,12% perusahaan terdaftar di BEI yang mengalami kerugian laba bersih.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan adalah dengan analisis rasio keuangan (Rafid *et al.*, 2019). Rasio keuangan dapat menunjukkan adanya perubahan pada kondisi keuangan perusahaan serta mengetahui potensi perusahaan dalam mengelola asset yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Tjandrakirana & Monika, 2014). Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). ROA dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja keuangan entitas dalam memperoleh laba dengan cara memaksimalkan *assets* yang dimilikinya (Aniswatin *et al.*, 2020). Dengan analisis rasio keuangan mampu mengevaluasi kinerja perusahaan dalam satu periode dan dapat menarik investor untuk melakukan investasi sehingga dapat menaikkan nilai entitas (Fangestu *et al.*, 2020). Sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Noviadewi dan Mulyani (2020); Rafid *et al.* (2019) bahwa kinerja keuangan baik akan mendorong nilai perusahaan menjadi lebih baik. Sebaliknya Tjandrakirana dan Monika (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang baik tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan, hal tersebut dikarenakan rasio yang digunakan tidak cukup mewakili untuk mengetahui kinerja keuangan.

Berdasarkan fakta dan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, mendorong peneliti untuk melaksanakan riset lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga mendasari judul penelitian yang peneliti buat, yaitu **“Pengaruh Penerapan Laporan Keberlanjutan, Asimetri Informasi dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Indonesia”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibentuk, berdasarkan latar belakang yang diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan laporan keberlanjutan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menganalisis asimetri informasi terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Pelaksanaan dari hasil riset ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh Laporan Keberlanjutan, *Information asymmetries* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Serta menjadi bahan rujukan penelitian-penelitian serupa dalam penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Pelaksanaan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literatur yang dapat digunakan oleh pemerintah atau lembaga regulator lainnya seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dalam meningkatkan kualitas pedoman atau standar pengungkapan laporan keberlanjutan yang sudah ada.